

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak diberlakukan otonomi daerah, pemerintah pusat telah mewajibkan pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan keuangan daerahnya secara transparan kepada publik dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah pusat memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui desentralisasi harapannya setiap daerah akan semakin baik dan bertanggung jawab dalam mengelola pembangunan daerahnya karena telah diberikan kekuasaan penuh oleh pemerintah pusat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan diberlakukan desentralisasi setiap daerah maka diharapkan akan semakin efektif dan efisien dalam pengelolaan pembangunan karena telah diberikan kebebasan yang luas oleh pemerintah pusat dalam mengatur kebijakan demi kemajuan daerahnya. Pelaksanaan Otonomi Daerah akan memberi dampak lebih baik terhadap layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat (publik). Pemerintah diharuskan melaksanakan akuntabilitas publik sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih adanya fakta pelaporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tidak sesuai

peraturan dan masih ditemukan kekeliruan yang ditemukan oleh BPK mengakibatkan tuntutan publik pada penyelenggaraan pemerintah yang baik akan meningkat. Hal tersebut akan membuat pemerintah semakin terdorong dan termotivasi dalam melaksanakan akuntabilitas publik. Banyak pihak yang membutuhkan dan mengandalkan informasi laporan keuangan yang dilaporkan atau dipublikasikan oleh pemerintah daerah untuk dasar pengambilan keputusan. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik akan mencerminkan tertib pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah yang disajikan wajib sesuai dengan pedoman standar akuntansi pemerintahan.

Fakta pelaporan LKPD di Indonesia menarik untuk dikaji. Jika melihat laporan keuangan pemerintah daerah lebih dalam lagi, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian data yang disajikan, dan banyak penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK pada laporan keuangan terutama dalam pengelolaan anggaran. Setiap penggunaan anggaran dan keuangan harus dipertanggung jawabkan dalam pengelolaannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, maka diwajibkan membuat laporan keuangan yang akuntabel, yang mana sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pentingnya pertanggung jawaban telah diperintahkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Bentuk tata Kelola pemerintahan yang baik salah satunya dengan tingkat kualitas LKPD yang baik dan dapat dipahami penggunaannya, oleh karena itu kualitas dalam LKPD sangat penting karena dapat memberikan dampak yang positif, bermanfaat dalam upaya pengambilan keputusan dan juga menentukan kebijakan di dalam pemerintahan di waktu mendatang, hal ini juga dapat memberikan dampak kepada peningkatan percepatan pembangunan serta penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi seperti kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia atau masyarakat yang belum berkompeten. Berkualitasnya suatu LKPD dapat dilihat melalui perolehan opini audit yang diterima pada pemerintah daerah tersebut. Opini audit merupakan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut (Mahmudi, 2016) opini audit dibagi ke dalam lima tingkatan, berikut tingkatan dari terendah ke tertinggi yaitu Tidak Memberi Pendapat (TMP), Tidak Wajar (TW), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada lima tingkatan tersebut, opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD dan menandakan bahwa LKPD dianggap sudah berkualitas baik.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kota Tegal menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2016 dan 2017 masih mendapatkan opini WDP, Sedangkan tahun 2018 hingga 2020 Pemerintah Kota Tegal memperoleh Opini WTP. Perolehan opini atas LKPD Kota Tegal disajikan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Perolehan Opini atas LKPD Kota Tegal Tahun 2016-2020

Entitas	Opini				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Tegal	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: bpk.go.id

Dari hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tegal pada tahun 2016 dan 2017 masih mendapatkan opini WDP, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas LKPD Kota Tegal masih lemah yang menyebabkan laporan keuangan yang disajikan belum berkualitas. Pada tahun 2018 sampai 2020 Kota Tegal mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK-RI, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dari laporan keuangan pemerintah Kota Tegal. Meskipun telah mendapatkan opini WTP, dalam hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Tegal TA. 2018-2020, BPK masih menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan dalam hasil pemeriksaan LKPD kota Tegal. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian internal atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal yang ditemukan BPK diantaranya; 1) Kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan pada empat OPD sebesar

Rp214.899.052,69; 2) Penatausahaan pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak tertib dan kelebihan bayar sebesar Rp787.531.300,00; 3) Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Tegal yang belum optimal, dan 4) Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah terlambat diterima PPKD sebesar Rp4.343.095.000,00; 5) Ketidaktepatan penganggaran belanja di 13 OPD sebesar Rp20.661.553.875 mengakibatkan lebih dan kurang saji belanja barang; 6) Pencatatan dan pengelolaan aset tetap belum memadai mengakibatkan meningkatnya risiko penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak, risiko kehilangan aset, dan sengketa tanah; 7) Terdapat tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas sebesar Rp42.251.699,94; 8) Kekurangan volume atas delapan paket pekerjaan pada DPUPR, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Diskop UKMP sebesar Rp315.851.761,52.

Pada penelitian ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas LKPD yang akan dibahas. Faktor pertama adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). SDM adalah unsur yang cukup penting pada sebuah organisasi, oleh karena itu supaya dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi maka dibutuhkan pengelolaan SDM yang baik. SDM merupakan pilar utama dalam sebuah organisasi atau instansi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, oleh karena itu sebaik apapun sistem dalam organisasi tersebut akan sia-sia jika tidak didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten terutama pada personal sumber daya manusia dalam Pendidikan, pengalaman, dan pelatihan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas LKPD yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Di era ini teknologi informasi sangat dibutuhkan di berbagai bidang salah satunya bidang ekonomi, berkembangnya teknologi informasi dapat memudahkan seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Dengan didukungnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, dengan ketersediaan teknologi informasi yang semakin maju diharapkan dapat membantu proses pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas serta tepat waktu.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Menurut Nordiawan (2010), SAKD adalah serangkaian proses mulai pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan baik secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi keuangan daerah dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 secara lengkap sehingga menjadikan laporan keuangan menjadi relevan dan dapat dibandingkan secara internal maupun eksternal, sehingga semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas LKPD adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat empat karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Jika suatu LKPD telah

memenuhi karakteristik kualitatif tersebut pada informasi yang terkandung maka, pemerintah daerah dianggap mampu memberikan peningkatan atas kualitas laporan keuangan. Peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan sesuatu yang krusial, karena banyaknya informasi yang terkandung didalamnya serta digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi pihak pemerintah. Indonesia masih banyak memiliki masalah yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang masih buruk atau belum berkualitas.

Faktor kelima yaitu sistem pengendalian internal (SPI). SPI didefinisikan sebagai kebijakan yang dibuat untuk mengontrol jalannya semua kegiatan untuk pemimpin ataupun para pegawai guna tercapainya tujuan organisasi. SPI merupakan proses pengendalian terhadap perilaku maupun aktivitas yang dikerjakan oleh pimpinan dan pegawai suatu instansi yang dilaksanakan secara berulang bukan dalam waktu tertentu,

Pemilihan lima faktor yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan banyaknya perbedaan hasil yang belum terlihat kejelasan arah pengaruh (positif atau negatif) dari masing-masing faktor. Kompetensi SDM pada penelitian Modo, dkk (2016) dan Armel, et al (2017) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan pada penelitian lainnya yaitu Wijayanti (2017) dan Zulkarnain dan Ningrum (2020) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Pemanfaatan TI pada penelitian Laila dan Agustini (2016) dan Ardianto dan Eforis (2019) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan pada penelitian lainnya yang dilakukan Modo, et al (2016) menyatakan sebaliknya.

Sistem akuntansi keuangan daerah pada penelitian Pujanira dan Taman (2017) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan pada penelitian Sholohah, et al.(2019) menyatakan sebaliknya yaitu sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Penerapan SAP pada penelitian (Mahardini dan Miranti (2018) dan Rahmawati, et al (2018) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan pada penelitian (Laila dan Agustini (2016) menyatakan bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. SPI pada penelitian Armel, et al (2017) dan Rahmawati, et al (2018) berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD, sedangkan menurut penelitian (Ardianto dan Eforis (2019) menyatakan sebaliknya.

Penelitian ini adalah hasil modifikasi penelitian Hasdiana dan Hasang (2018). Pada penelitian ini menggunakan sampel semua pengelola keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kota Tegal, karena pada penelitian sebelumnya hanya mengambil sampel dari Badan Keuangan Daerah (BKD), Inspektorat dan DPRD Kota Parepare saja. Dalam penelitian ini juga menambahkan variable Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan seseorang atau individu dalam menjalankan fungsi dan wewengangnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. SDM adalah komponen utama sekaligus penggerak dalam organisasi guna melaksanakan visi misi serta tujuan organisasi. Pada penelitian terdahulu mengenai kompetensi SDM masih menunjukkan hasil yang

belum konsisten masih ada penelitian yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi SMD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan rangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan yang dilakukan secara manual atau dengan bantuan aplikasi untuk pertanggungjawaban pemerintah. Penambahan variable juga didasari oleh penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang belum konsisten ada penelitian yang menunjukkan hasil positif berpengaruh dan juga masih ada penelitian yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal, sehingga peneliti mengambil judul **“Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh positif dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh positif dari Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh positif dari Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh positif dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh positif dari Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan teori serta informasi ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya pada ilmu akuntansi sektor publik. Dapat dijadikan referensi atau rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan pertimbangan pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kualitas laporan keuangan daerah.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

d. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengetahuan tambahan dan melatih kemampuan berpikir kritis mengenai determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.